

# Polri dan Ekonomi Gelap: Judi Online, Narkoba, dan Kejahatan Terorganisir

Tim CSP – Center for Strategic Policing

## Pendahuluan

EKONOMI gelap (shadow economy) telah lama menjadi salah satu ancaman laten bagi stabilitas negara, bukan hanya karena sifatnya yang melanggar hukum, tetapi juga karena daya rusaknya terhadap fondasi sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, fenomena ini menemukan wujud paling kasat mata dalam maraknya **judi online**, peredaran **narkoba**, serta berkembangnya **kejahatan terorganisir** yang berjejaring lintas negara. Aktivitas ilegal tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial raksasa bagi pelakunya, melainkan juga menciptakan lingkaran setan kemiskinan, kekerasan, dan korupsi yang sulit diputus.

Bagi negara, kerugian akibat ekonomi gelap bersifat ganda: kehilangan potensi penerimaan pajak sekaligus meningkatnya biaya sosial yang harus ditanggung akibat rusaknya tatanan masyarakat. Judi online, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menghancurkan sendi-sendi ekonomi

keluarga, tetapi juga melahirkan generasi rentan yang terjebak utang dan kriminalitas. Demikian pula narkoba, yang menjerat jutaan orang di Indonesia dalam lingkaran penyalahgunaan dan kecanduan, serta menempatkan negeri ini sebagai salah satu pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Di balik fenomena ini, terdapat **jejaring kejahatan terorganisir** yang rapi, adaptif, dan canggih. Mereka memanfaatkan teknologi digital, jalur laut yang sulit diawasi, hingga kelemahan regulasi di berbagai sektor. Jaringan kriminal transnasional ini bergerak lintas batas, sehingga pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum nasional.

Namun, permasalahan menjadi jauh lebih kompleks ketika **oknum aparat kepolisian sendiri terlibat dalam ekonomi gelap**. Dalam beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh sejumlah kasus: mulai dari perwira yang menjadi backing bandar judi online, anggota yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, hingga kasus-kasus perlindungan terselubung terhadap bisnis ilegal di tingkat lokal. Skandal besar seperti keterlibatan polisi dalam kasus narkoba jaringan internasional, atau terbongkarnya keterkaitan oknum dengan bandar judi daring, memperlihatkan bahwa sebagian aparat justru menjadi bagian dari persoalan.

Keterlibatan ini memperparah **trust deficit** yang sudah dialami Polri. Alih-alih dipercaya sebagai garda terdepan melawan ekonomi gelap, sebagian publik justru memandang Polri ambigu: menindak di satu sisi, tetapi melindungi atau bahkan ikut menikmati

keuntungan di sisi lain. Dilema ini membuat Polri menghadapi tantangan legitimasi yang jauh lebih berat, karena pemberantasan ekonomi gelap bukan hanya soal memerangi musuh eksternal, melainkan juga soal membersihkan tubuhnya sendiri.

Dengan demikian, membicarakan Polri dan ekonomi gelap bukan sekadar soal operasi penegakan hukum, tetapi juga menyangkut **integritas dan reformasi internal**. Tanpa keberanian menghadapi persoalan di dalam tubuhnya sendiri, setiap langkah Polri dalam memberantas judi online, narkoba, dan kejahatan terorganisir akan selalu dipertanyakan publik. Makalah ini berusaha mengurai bagaimana ekonomi gelap terbentuk dan berkembang, bagaimana Polri berhadapan dengan jaringan kriminal transnasional, serta bagaimana keterlibatan internal aparat justru menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan.

## **Bagian 1: Ekonomi Gelap dan Pola Operasi Kejahatan**

Ekonomi gelap atau *shadow economy* merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di luar mekanisme resmi negara, tidak tercatat dalam statistik nasional, dan tidak dikenai pajak. Aktivitas ini mencakup beragam bentuk, mulai dari perdagangan ilegal barang terlarang seperti narkoba, praktik perjudian daring, hingga bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Meski tidak muncul dalam

perhitungan resmi PDB, ekonomi gelap menyedot aliran dana raksasa yang pada akhirnya menggerogoti potensi fiskal negara serta menimbulkan biaya sosial yang sangat besar.

Dampaknya terhadap negara bersifat multidimensi. Pertama, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah signifikan. Kedua, ekonomi gelap memperbesar biaya sosial: meningkatnya angka kriminalitas, keretakan keluarga, dan rusaknya moralitas generasi muda. Ketiga, ia menciptakan ekosistem korupsi karena jaringan ilegal sering berusaha melindungi diri dengan menyuap aparat penegak hukum maupun pejabat publik. Pada titik ini, ekonomi gelap bukan sekadar masalah kriminal, tetapi ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Karakteristik ekonomi gelap membuatnya sangat sulit diberantas. Ia bersifat **tak tersentuh pajak** karena seluruh transaksi berlangsung di luar mekanisme resmi, menggunakan uang tunai, aset kripto, atau skema *underground banking*. Ia juga melibatkan **jaringan transnasional** yang bergerak lintas negara, memanfaatkan perbedaan regulasi, dan beroperasi secara terdesentralisasi. Selain itu, ekonomi gelap identik dengan **kekerasan dan intimidasi**. Organisasi kriminal menggunakan kekuatan fisik, senjata, hingga pembunuhan sebagai sarana menjaga loyalitas internal dan menakut-nakuti pesaing maupun aparat.

Dalam konteks Indonesia, dua sektor paling menonjol dari ekonomi gelap adalah **judi online** dan **narkoba**. Judi online memanfaatkan celah teknologi: server berada di luar negeri, transaksi berlangsung

melalui perbankan digital atau dompet elektronik, sementara promosi dilakukan secara masif lewat media sosial. Uang dari pemain terus mengalir ke rekening bandar, kemudian dicuci melalui berbagai saluran, termasuk bisnis sah, untuk menyamarkan asal-usulnya. Fenomena ini menciptakan arus uang ilegal yang sulit dilacak, tetapi nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.

Narkoba memiliki pola peredaran uang yang lebih kompleks. Barang ilegal masuk melalui jalur laut dan udara, lalu didistribusikan ke berbagai wilayah melalui jaringan kurir. Setiap tahap melibatkan perputaran uang tunai dalam jumlah besar, yang kemudian dicuci melalui bisnis properti, hiburan malam, atau perdagangan komoditas. Pola ini menciptakan lingkaran setan: keuntungan dari narkoba membiayai operasi jaringan kriminal, melanggengkan kekerasan, sekaligus memperkuat korupsi aparat yang terlibat.

Dengan karakteristik seperti ini, ekonomi gelap tidak bisa dipandang sebagai fenomena kriminal biasa. Ia adalah sistem ekonomi paralel yang berkompetisi dengan negara, menyaingi otoritas resmi, dan merusak legitimasi hukum. Tantangan bagi Polri adalah bagaimana menghadapi sebuah “ekonomi bayangan” yang lebih cair, adaptif, dan sering kali memiliki daya jangkauan melebihi mekanisme negara itu sendiri.

## **Bagian 2: Judi Online sebagai Fenomena Sosial-Ekonomi**

Fenomena judi online dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan drastis di Indonesia. Akses internet yang semakin luas, penetrasi smartphone yang tinggi, dan lemahnya literasi digital masyarakat menjadikan perjudian daring kian mudah menjangkau lapisan sosial mana pun. Dari perkotaan hingga pedesaan, dari kalangan pekerja hingga pelajar, iklan dan promosi judi online menyusup lewat media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs-situs hiburan digital. Data resmi Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga pertengahan 2024, jutaan konten bermuatan judi online telah diblokir, namun gelombang situs baru terus bermunculan, seolah tidak ada habisnya.

Ledakan judi online membawa dampak sosial yang serius. Di level mikro, banyak keluarga hancur karena salah satu anggotanya terjerat hutang akibat kalah bermain. Tidak sedikit pekerja kehilangan pendapatan karena gaji habis tersedot untuk “deposit”, sementara pelajar dan mahasiswa terjebak dalam pola kecanduan yang merusak masa depan mereka. Fenomena ini turut memperdalam lingkaran kemiskinan: orang yang sudah rentan secara ekonomi justru makin terpuruk karena berharap cepat kaya melalui taruhan digital.

Di level sosial yang lebih luas, judi online berkontribusi pada meningkatnya kriminalitas. Banyak kasus pencurian, perampokan kecil, hingga kekerasan

domestik berakar dari tekanan finansial akibat kalah berjudi. Kondisi ini menjadikan judi online bukan sekadar hiburan ilegal, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial.

Tantangan bagi Polri dalam menanggulangi fenomena ini sangat kompleks. Pertama, **server judi online mayoritas berada di luar negeri**, sehingga akses penindakan langsung terbatas. Proses hukum lintas negara membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang rumit dan sering kali berlarut-larut. Kedua, jaringan lokal yang mengoperasikan promosi, perekrutan, dan distribusi keuntungan sangat kuat serta berlapis. Mereka menggunakan rekening bank atas nama “kaki tangan”, memanfaatkan teknologi *money mule*, hingga mencuci uang lewat usaha sah. Ketiga, terdapat **isu keterlibatan oknum aparat** yang justru melindungi atau mengambil keuntungan dari bisnis ilegal ini. Kasus semacam ini memperparah krisis kepercayaan publik, karena institusi yang seharusnya menjadi garda depan pemberantasan justru diduga ikut menikmati keuntungan.

Situasi tersebut menempatkan Polri dalam posisi dilematis. Di satu sisi, publik menuntut tindakan tegas dan efektif untuk memberantas judi online yang telah merusak sendi-sendi sosial. Di sisi lain, keterbatasan regulasi lintas negara, kecanggihan modus operandi, dan bayang-bayang keterlibatan oknum membuat penindakan sering kali hanya menyasar “pemain kecil”, sementara aktor utama tetap beroperasi dengan leluasa.

Dengan segala kompleksitasnya, judi online kini tidak lagi sekadar masalah hukum, tetapi telah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang menyedot energi bangsa. Polri, sebagai institusi penegak hukum, dituntut bukan hanya hadir dalam kapasitas represif, tetapi juga mampu memimpin gerakan preventif dan kolaboratif untuk memutus siklus perjudian digital ini.

### **Bagian 3: Narkoba dan Industri Ilegal**

Indonesia telah lama menjadi salah satu pasar terbesar narkoba di kawasan Asia Tenggara. Posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta pertumbuhan kelas menengah menjadikan Indonesia bukan hanya jalur transit, tetapi juga pasar konsumsi yang sangat menggiurkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa kali merilis data bahwa jutaan warga Indonesia tercatat sebagai pengguna narkoba, dengan tren peredaran yang semakin meluas ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya relatif steril. Kondisi ini menjadikan Indonesia salah satu target utama peredaran narkoba internasional.

Dalam lingkup global, sindikat internasional memainkan peran dominan. Kawasan **Golden Triangle** – meliputi Myanmar, Laos, dan Thailand – masih menjadi produsen utama metamfetamin (*sabu-sabu*) dan heroin yang sebagian besar mengalir ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selain itu, jaringan



**Afrika Barat** dikenal menguasai jalur perdagangan kokain dan heroin, dengan modus *courier* antarnegara menggunakan bandara internasional. Tidak kalah penting, kartel regional yang lebih cair muncul di Asia Timur dan Pasifik, memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di perairan untuk memperluas pasar. Dalam banyak kasus, sindikat ini bekerja sama dengan kelompok lokal di Indonesia untuk mengatur distribusi, perekrutan kurir, hingga pencucian uang hasil perdagangan.

Tantangan penindakan terhadap peredaran narkoba di Indonesia sangat berat. Pertama, **jalur laut** menjadi titik rawan utama. Dengan garis pantai lebih dari 80 ribu kilometer, mustahil bagi aparat untuk mengawasi seluruh wilayah perbatasan. Sindikat kerap menggunakan kapal kecil, memecah muatan di tengah laut, atau menyamarkannya dalam kontainer legal. Kedua, terdapat **pelibatan aparat penegak hukum** dalam jaringan narkoba, baik sebagai pelindung maupun sebagai pelaku aktif. Kasus-kasus oknum polisi dan petugas lapas yang terungkap memperlihatkan bagaimana infiltrasi sindikat ke dalam institusi negara melemahkan upaya pemberantasan.

Ketiga, terdapat masalah **siklus penjara** yang justru menjadi ruang reproduksi kejahatan. Banyak bandar tetap mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji, memanfaatkan komunikasi ilegal dan jaringan loyalis di luar. Situasi ini menegaskan bahwa penjara bukan sekadar tempat pembinaan, tetapi justru menjadi simpul baru dalam rantai distribusi narkoba.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas, melainkan sebuah industri ilegal dengan daya rusak luar biasa. Ia menggerus generasi muda, menguras sumber daya negara, dan menciptakan lingkaran setan korupsi serta kekerasan. Bagi Polri, tantangan terbesar adalah bagaimana menembus jaringan transnasional yang rapi, memberantas keterlibatan aparat, sekaligus mencegah agar lembaga penegakan hukum tidak justru menjadi bagian dari industri ilegal ini.

#### **Bagian 4: Kejahatan Terorganisir dan Kolaborasi Global**

Kejahatan terorganisir memiliki karakteristik yang membedakannya dari kriminalitas biasa. Ia beroperasi dengan struktur yang menyerupai organisasi modern: terdapat **hirarki kepemimpinan**, pembagian peran yang jelas, hingga sistem kontrol internal yang menjamin loyalitas anggota. Untuk menjaga eksistensi dan kewibawaan, kelompok kriminal ini tak segan menggunakan **kekerasan**—mulai dari intimidasi, pemerasan, hingga pembunuhan—sebagai sarana mengendalikan pesaing maupun membungkam pihak yang berusaha melawan. Selain itu, kejahatan terorganisir sangat bergantung pada praktik **pencucian uang**. Uang hasil bisnis ilegal dialirkan melalui bisnis sah seperti properti, hiburan malam, perdagangan ekspor-impor, hingga aset digital, agar seolah-olah berasal dari sumber legal. Inilah yang membuat kelompok kriminal mampu

bertahan dan bahkan tumbuh, karena mereka berhasil menyamarkan jejak finansialnya.

Di Indonesia, kelemahan regulasi dan lemahnya integritas aparat sering dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Celah hukum dalam pengawasan perbankan dan sistem keuangan menjadi jalur mudah untuk praktik pencucian uang. Selain itu, kelompok kriminal kerap memanfaatkan **oknum aparat** untuk melindungi operasi mereka, baik melalui suap, kompromi, maupun ancaman. Dalam banyak kasus, jaringan kriminal tidak hanya bertahan karena kekuatan internalnya, tetapi juga karena adanya *backing* dari dalam institusi negara. Kerapuhan ini menjadikan pemberantasan kejahatan terorganisir sering kali sekadar menindak “pemain bawah”, sementara figur sentral tetap tak tersentuh.

Jika ditarik ke konteks global, praktik serupa juga tampak di negara lain. **Mafia Italia** misalnya, sejak lama membangun struktur organisasi yang sangat rapi, dengan kode etik internal, sistem “*omerta*” (sumpah diam), dan kemampuan menyusup ke politik maupun ekonomi formal. **Kartel narkoba Meksiko** menunjukkan wajah yang lebih brutal: penggunaan senjata militer, penculikan, hingga perang terbuka dengan aparat negara. Sementara di Jepang, **Yakuza** justru mengadopsi model “semi-legal”, di mana mereka tidak sepenuhnya sembunyi, melainkan beroperasi di ruang abu-abu dengan aktivitas bisnis resmi yang bercampur dengan operasi kriminal.

Perbandingan ini memberi pelajaran penting bahwa kejahatan terorganisir selalu menemukan cara

beradaptasi dengan konteks lokal. Di negara dengan regulasi lemah dan aparat yang mudah disuap, mereka tumbuh melalui infiltrasi. Di negara dengan aparat kuat tetapi masyarakat permisif, mereka bertahan dengan cara “melembagakan diri” dan menampilkan wajah legal. Hal ini berarti bahwa ancaman kejahatan terorganisir tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang statis, melainkan sebagai entitas dinamis yang terus berevolusi mengikuti peluang dan celah kelemahan negara.

Bagi Polri, memahami pola global ini penting agar strategi penindakan tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu membaca dinamika yang lebih luas. Sebab, kelompok kriminal yang beroperasi di Indonesia bukan entitas terisolasi; mereka sering kali bagian dari jejaring global yang memiliki sumber daya, pengalaman, dan koneksi lintas negara.

## Bagian 5: Peran dan Tantangan Polri

Sebagai institusi penegak hukum utama di Indonesia, Polri memiliki peran strategis dalam pemberantasan ekonomi gelap, khususnya pada kasus **judi online** dan **narkoba**. Dari sisi operasional, Polri telah melakukan berbagai operasi khusus, seperti *cyber patrol* untuk menutup ribuan situs judi daring, serta operasi lintas wilayah bersama BNN dalam membongkar sindikat narkoba. Di beberapa kasus, Polri berhasil menangkap bandar besar maupun menyita aset miliaran rupiah hasil

kejahatan. Upaya ini menunjukkan bahwa kapasitas Polri dalam menghadapi kejahatan terorganisir tidak bisa diremehkan. Namun, kompleksitas ekonomi gelap membuat capaian tersebut sering kali hanya menyentuh permukaan, sementara akar masalah tetap bertahan.

Tantangan internal menjadi penghambat besar dalam memperkuat peran Polri. Pertama, **keterlibatan oknum aparat** dalam bisnis judi maupun narkoba menimbulkan keretakan serius di tubuh institusi. Setiap kali kasus ini mencuat, kepercayaan publik terkikis dan memberi kesan bahwa Polri tidak sepenuhnya bersih. Kedua, **keterbatasan teknologi** menjadi masalah krusial. Dalam menghadapi jaringan judi online lintas negara dan pencucian uang digital, Polri masih sering tertinggal dibanding kemampuan pelaku yang memanfaatkan teknologi blockchain, *money mule*, dan server luar negeri. Ketiga, Polri menghadapi **trust deficit** yang tajam. Krisis kepercayaan publik membuat setiap langkah penegakan hukum rawan dicurigai sebagai setengah hati atau sarat kepentingan. Tanpa legitimasi sosial, efektivitas penindakan akan selalu terbatas.

Selain tantangan internal, Polri juga berhadapan dengan hambatan eksternal. Sistem **hukum yang lemah** menjadikan banyak pelaku kejahatan terorganisir hanya mendapat vonis ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Perbedaan **regulasi antarnegara** memperumit kerja sama internasional: server judi online di luar negeri sulit disentuh, sindikat narkoba lintas negara sulit dibongkar tanpa

mutual legal assistance (MLA) yang lamban. Lebih jauh, kejahatan terorganisir kini beroperasi dalam **jejaring digital global**, yang memungkinkan mereka memindahkan dana, berkomunikasi, dan merekrut anggota tanpa batas geografis. Polri, dengan struktur nasional yang kaku, harus berhadapan dengan jaringan cair yang bergerak secara desentralisasi.

Keseluruhan tantangan ini menggambarkan dilema besar: di satu sisi, Polri dituntut menjadi benteng terakhir negara dalam melawan ekonomi gelap; di sisi lain, keterbatasan internal dan hambatan eksternal membuat peran tersebut sulit dijalankan secara maksimal. Tanpa reformasi mendasar, risiko bahwa Polri justru menjadi bagian dari masalah – bukan solusi – akan semakin besar.

## **Bagian 6: Strategi dan Solusi**

Menghadapi kompleksitas ekonomi gelap yang mencakup judi online, narkoba, dan kejahatan terorganisir, Polri tidak bisa bekerja dengan pendekatan tunggal. Strategi yang ditempuh harus menyeluruh, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun internasional. Setidaknya ada empat pendekatan strategis yang bisa menjadi kerangka solusi.

Pertama, **pendekatan hukum**. Revisi regulasi mutlak diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku. Undang-undang terkait ITE, narkoba, dan anti-pencucian uang

harus diperkuat agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Penerapan **cyber law** yang lebih tegas penting untuk menindak bandar judi online lintas negara, sementara penguatan instrumen **anti-money laundering** akan memutus aliran dana ilegal yang menjadi nadi utama kejahatan terorganisir. Tanpa regulasi yang kokoh, penegakan hukum akan selalu tertinggal dari inovasi kejahatan.

Kedua, **pendekatan institusional**. Polri perlu memperkuat mekanisme **pengawasan internal** untuk mencegah keterlibatan oknum. Reformasi integritas harus ditempatkan sebagai prioritas, termasuk melalui sistem rekrutmen, promosi, dan penghukuman yang transparan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga lain seperti **PPATK**, **OJK**, dan **Bea Cukai** sangat krusial. Melalui pertukaran data transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan perbankan, serta kontrol atas arus barang di perbatasan, Polri dapat mempersempit ruang gerak jaringan kriminal.

Ketiga, **pendekatan internasional**. Karena judi online dan narkoba adalah masalah lintas batas, kerja sama global menjadi keniscayaan. Polri perlu memperkuat keterlibatan dalam forum internasional seperti **Interpol**, **UNODC**, dan **ASEANAPOL**, untuk berbagi intelijen, melakukan operasi bersama, dan menyepakati *mutual legal assistance*. Tanpa sinergi global, sulit bagi Polri untuk menjangkau bandar di luar negeri atau membongkar jaringan transnasional yang kompleks.

Keempat, **pendekatan sosial**. Pemberantasan ekonomi gelap tidak hanya soal penindakan, tetapi

juga pencegahan. Edukasi masyarakat, peningkatan **literasi digital**, dan kampanye publik tentang bahaya judi online serta narkoba harus terus diperluas. Di sisi lain, korban dari kecanduan narkoba maupun judi online perlu difasilitasi melalui program **rehabilitasi**, agar mereka tidak terus terjebak dalam siklus kejahatan. Tanpa menyentuh akar sosial, pemberantasan hanya akan menjadi lingkaran tanpa akhir.

Keempat strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Regulasi yang kuat tanpa integritas aparat akan lumpuh. Aparat yang bersih tanpa dukungan internasional akan kewalahan. Begitu pula penindakan yang keras tanpa pendekatan sosial hanya akan memunculkan masalah baru. Oleh karena itu, strategi menghadapi ekonomi gelap harus dilihat sebagai agenda **nasional kolektif** yang melibatkan negara, masyarakat, dan komunitas global.

## **Penutup: Jalan Panjang Melawan Ekonomi Gelap**

Perang melawan ekonomi gelap—baik dalam bentuk judi online, narkoba, maupun kejahatan terorganisir—tidak bisa dipandang sekadar sebagai urusan penindakan kriminal. Pada dasarnya, tantangan terbesar terletak pada bagaimana Polri membangun **integritas** dan memulihkan **legitimasi** di mata publik. Tanpa kepercayaan masyarakat, setiap langkah represif akan kehilangan daya dukung sosial,



dan tanpa integritas internal, Polri berisiko terjebak dalam paradoks: menjadi bagian dari masalah alih-alih solusi.

Ke depan, reformasi kepolisian harus ditempatkan sebagai kunci utama. Reformasi ini bukan hanya menyangkut penguatan kapasitas teknologi atau penambahan personel, melainkan perombakan kultur, tata kelola, dan sistem pengawasan yang mampu menutup ruang bagi praktik koruptif. Dalam konteks yang lebih luas, pemberantasan ekonomi gelap hanya bisa efektif melalui **kerja sama lintas sektor**—antara Polri, lembaga keuangan, otoritas fiskal, lembaga internasional, serta masyarakat sipil. Sinergi ini akan mempersempit ruang gerak jaringan kriminal sekaligus memperkuat daya tahan sosial bangsa.

Dengan demikian, jalan panjang melawan ekonomi gelap bukan sekadar perkara membongkar jaringan kriminal, tetapi juga perjuangan membangun institusi kepolisian yang bersih, profesional, dan dipercaya rakyatnya. Hanya dengan legitimasi publik yang kuat, Polri dapat berdiri di garis depan menjaga kedaulatan negara dari cengkeraman ekonomi bayangan yang menggerogoti fondasi bangsa.[]

